


Membangun Pasar Tradisional yang Berdaya dan Tertata: Studi Kebijakan Penataan Pasar Mardika Kota Ambon

Building an Empowered and Well-Organized Traditional Market: A Policy Study on the Management of Mardika Market in Ambon City

 <https://doi.org/012345678/vol16iss1pp16-31>

Fachrul Rozi Djakiman^{1*}, Amir Faisal Kotarumalos²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia

*arulrozidjakiman17@gmail.com

Abstract

Traditional markets play a strategic role in the regional economy, serving as central hubs for community economic activities. This study aims to analyze the policy and management of Mardika Market in Ambon City to create an empowered and well-organized market. A qualitative approach with a descriptive method was employed, relying on primary and secondary data obtained through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that the Ambon City Government plays a role as a regulator, monitor, and motivator in managing Mardika Market. As a regulator, the government formulates policies and regulations governing market activities. As a monitor, it is responsible for overseeing traders' compliance and market management. As a motivator, the government strives to encourage traders to enhance productivity and maintain market cleanliness. However, waste management remains a major challenge. Additionally, transparency in management and open communication between market administrators and traders are deemed essential for improving market governance effectiveness. In terms of security, the market is relatively safe, yet further improvements in orderliness and cleanliness are still necessary. This study underscores the importance of synergy between the government and traders in realizing an empowered and well-organized market. The implications of this research provide recommendations for the development of social and political sciences, particularly in public policy and traditional market management. Moreover, this study highlights the significance of a participatory approach in market management to enhance community welfare and ensure local economic sustainability.

Keywords: *Traditional Market, Market Governance, Public Policy, Economic Sustainability, Local Economy*

Info Artikel

Naskah diterima: 03/01/2023

Revisi terakhir: 02/02/2023

Disetujui: 13/02/2023

Copyright © by the Authors

This work is licensed under Creative Commons Attribution
License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Pasar tradisional memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian lokal, terutama di kota-kota berkembang seperti Ambon. Pasar bukan hanya tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga menjadi pusat interaksi sosial dan budaya yang mencerminkan dinamika masyarakat setempat (Jafari et al., 2022; Perren & Kozinets, 2018). Salah satu pasar terbesar dan paling vital di Kota Ambon adalah Pasar Mardika, yang menjadi pusat distribusi barang kebutuhan pokok serta sumber penghidupan bagi ribuan pedagang kecil dan menengah (Pattiasina & Tantoly, 2019; Soselisa, 2022). Namun, di balik peran strategisnya, pasar ini menghadapi berbagai tantangan serius dalam hal pengelolaan, ketertiban, dan kebersihan. Salah satu isu utama adalah masalah sampah yang masih belum

terkelola dengan baik, yang berdampak pada kesehatan lingkungan dan kenyamanan pengunjung (Luturlen, 2018; Nendissa, 2022). Selain itu, komunikasi antara pengelola pasar dan pedagang belum sepenuhnya efektif, sehingga sering terjadi kesalahpahaman dalam implementasi kebijakan (Kobloy, 2021). Kondisi ini menimbulkan permasalahan mendasar tentang strategi kebijakan yang dapat diterapkan untuk menciptakan pasar yang lebih tertata dan berdaya.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas tentang pengelolaan pasar tradisional dan tantangan yang dihadapinya. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Jan et al. (2021) menyoroti pentingnya regulasi yang jelas dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pasar tradisional. Studi ini menunjukkan bahwa tanpa adanya kebijakan yang konsisten, pasar akan cenderung mengalami penurunan kualitas dalam hal kebersihan, keamanan, dan daya saing. Sementara itu, Koopmans et al., (2018) dan Sousa et al. (2019) menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan pasar tradisional sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah dan para pedagang. Mereka menemukan bahwa pasar yang memiliki sistem manajemen yang terbuka dan partisipatif cenderung lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang serta memberikan kenyamanan bagi pengunjung.

Studi lain yang dilakukan oleh Bates (2019) mengkaji pengaruh modernisasi pasar terhadap daya saing pasar tradisional. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa modernisasi yang diterapkan tanpa mempertimbangkan karakteristik sosial-ekonomi pedagang justru dapat memperburuk kondisi pasar tradisional. Hal ini sejalan dengan temuan dari Cull et al. (2017) dan Liu & Atuahene-Gima (2018), yang mengungkapkan bahwa intervensi pemerintah dalam modernisasi pasar harus mempertimbangkan aspek partisipatif dan inklusif agar tidak menimbulkan resistensi dari pedagang. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Dangelico & Vocalelli (2017) menunjukkan bahwa aspek kebersihan dan ketertiban sangat mempengaruhi daya tarik pasar tradisional. Pasar yang dikelola dengan baik dan bersih akan memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar yang dibiarkan tanpa pengelolaan yang baik.

Bogers et al. (2020) menyoroti bahwa kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan pedagang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan pasar. Dalam penelitian ini, kebijakan yang mencakup pelatihan manajemen usaha bagi pedagang, peningkatan fasilitas pasar, serta penguatan regulasi terhadap pungutan liar terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi pedagang (Bacq et al., 2022; Civera et al., 2019). Hal ini diperkuat oleh studi yang dilakukan oleh Hidayat et al. (2023), yang menunjukkan bahwa pasar yang memiliki perencanaan infrastruktur yang baik dapat mengurangi tingkat kejahatan seperti pencopetan dan pungutan liar. Sementara itu, penelitian dari Suprayitno et al. (2019) menegaskan bahwa penguatan tata kelola pasar melalui sistem digitalisasi transaksi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pasar tradisional.

Namun, meskipun berbagai penelitian telah membahas berbagai aspek pengelolaan pasar tradisional, masih terdapat kesenjangan dalam studi yang mengkaji sinergi antara pemerintah dan pedagang dalam menciptakan pasar yang lebih tertata dan berdaya.

Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada regulasi atau modernisasi, tetapi belum banyak yang menyoroti peran pemerintah sebagai motivator dalam mendorong perubahan dari dalam, yaitu melalui peningkatan produktivitas pedagang serta partisipasi mereka dalam menjaga kebersihan dan ketertiban pasar. Selain itu, belum banyak kajian yang membahas pentingnya komunikasi terbuka antara pengelola dan pedagang dalam menciptakan tata kelola yang efektif.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menjawab kebutuhan akan strategi pengelolaan pasar yang tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif pedagang dalam menciptakan lingkungan pasar yang lebih baik. Dengan memahami bagaimana peran pemerintah sebagai regulator, monitor, dan motivator, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam mengelola pasar tradisional secara lebih efektif dan berkelanjutan. Kajian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan pasar tidak hanya bergantung pada kebijakan yang diterapkan dari atas, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut diterima dan dijalankan oleh pedagang serta komunitas pasar itu sendiri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan penataan dan pengelolaan Pasar Mardika Kota Ambon guna menciptakan pasar yang berdaya dan tertata. Dengan memahami bagaimana sinergi antara pemerintah dan pedagang dapat diwujudkan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu sosial dan humaniora, terutama dalam bidang kebijakan publik dan manajemen pasar tradisional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung keberlanjutan ekonomi lokal melalui pengelolaan pasar yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam kebijakan penataan dan pengelolaan Pasar Mardika Kota Ambon. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman, persepsi, dan dinamika sosial yang terlibat dalam pengelolaan pasar, yang tidak dapat sepenuhnya ditangkap melalui pendekatan kuantitatif (Creswell, 2017). Sementara itu, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi pasar secara holistik, termasuk aspek kebersihan, keamanan, komunikasi antara pedagang dan pengelola, serta efektivitas kebijakan yang diterapkan.

Pasar Mardika dipilih sebagai lokus penelitian karena merupakan pasar tradisional terbesar dan paling strategis di Kota Ambon, yang berperan sebagai pusat perekonomian daerah serta menjadi mata pencaharian utama bagi ribuan pedagang kecil dan menengah. Dibandingkan dengan pasar lainnya di Kota Ambon, Pasar Mardika memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dalam hal jumlah pedagang, tingkat interaksi ekonomi, serta tantangan dalam pengelolaan sampah dan ketertiban. Selain itu, pasar ini juga sering menjadi sorotan dalam kebijakan pemerintah daerah terkait revitalisasi dan modernisasi pasar tradisional. Oleh karena itu, memahami dinamika pengelolaan Pasar Mardika dapat memberikan

wawasan yang lebih luas tentang efektivitas kebijakan pemerintah dalam menata pasar tradisional secara berkelanjutan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam pengelolaan Pasar Mardika. Informan yang diwawancarai terdiri dari perwakilan Dinas Perdagangan & Perindustrian Kota Ambon sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam regulasi dan kebijakan pasar, pengelola pasar yang merupakan pihak yang menjalankan operasional harian pasar, serta para pedagang yang menjadi aktor utama dalam kegiatan ekonomi di pasar ini. Jumlah informan yang diwawancarai sebanyak 10 orang, yang terdiri dari 3 orang dari Dinas Perdagangan & Perindustrian Kota Ambon, 2 orang pengelola pasar, dan 5 pedagang dengan latar belakang yang berbeda untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas.

Selain wawancara, observasi langsung dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kondisi pasar. Observasi mencakup aspek kebersihan pasar, pola interaksi antara pedagang dan pembeli, ketertiban dalam penggunaan lahan pasar, serta bagaimana kebijakan yang diterapkan berdampak pada aktivitas harian di pasar. Observasi juga mencatat kendala-kendala yang terjadi di lapangan, seperti permasalahan sampah, pengaturan ruang dagang, serta efektivitas pengawasan dari pihak pengelola pasar.

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber seperti laporan kebijakan pemerintah, jurnal ilmiah, dan buku yang relevan dengan tema penelitian ini (Braun & Clarke, 2016). Laporan kebijakan pemerintah yang dianalisis mencakup regulasi dari Dinas Perdagangan & Perindustrian Kota Ambon terkait pengelolaan pasar tradisional, dokumen perencanaan tata kota yang mencantumkan strategi revitalisasi pasar, serta kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan di pasar tradisional. Selain itu, jurnal ilmiah dan buku yang digunakan sebagai referensi mencakup studi tentang tata kelola pasar tradisional, dampak kebijakan modernisasi pasar terhadap pedagang kecil, serta penelitian sebelumnya yang membahas aspek sosial dan ekonomi dari keberadaan pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi lokal.

Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, yaitu mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dari hasil wawancara dan observasi. Langkah-langkah analisis meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Kvale & Brinkmann, 2019). Reduksi data dilakukan dengan menyortir dan memilih informasi yang relevan dari hasil wawancara dan observasi, kemudian data disajikan dalam bentuk narasi dan tabel untuk memudahkan interpretasi. Kesimpulan ditarik berdasarkan pola yang muncul dari analisis tematik.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi yang mencakup triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu (Dewasiri et al., 2018; Moon, 2019). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber, seperti pejabat Dinas Perdagangan & Perindustrian Kota Ambon, pengelola pasar, dan pedagang, guna memastikan konsistensi dan validitas temuan.

Triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen kebijakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pengelolaan Pasar Mardika. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan dengan mengamati kondisi pasar pada waktu yang berbeda, baik pada jam sibuk maupun di luar jam operasional utama, guna menangkap dinamika pasar secara lebih akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulator, Monitor, dan Motivator: Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Pasar Mardika

Pasar Mardika sebagai pasar tradisional terbesar di Kota Ambon memiliki peran vital dalam menopang ekonomi masyarakat. Namun, dinamika pengelolaan pasar ini tidak terlepas dari campur tangan pemerintah sebagai aktor utama dalam penataan, pengawasan, dan pembinaan. Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai regulator, monitor, dan motivator dalam menjaga keberlanjutan pasar.

Sebagai regulator, Pemerintah Kota Ambon, melalui Dinas Perdagangan & Perindustrian, telah menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya menata Pasar Mardika agar lebih bersih, tertib, dan nyaman bagi pedagang serta pembeli. Regulasi mencakup aspek kebersihan pasar, keamanan, hingga zonasi pedagang. Salah satu kebijakan utama adalah pengelolaan limbah dan sampah yang mewajibkan pedagang untuk menjaga kebersihan di area masing-masing. Namun, di lapangan, implementasi aturan ini masih menghadapi tantangan. Seorang pedagang sembako, MAH, menuturkan bahwa "Setiap hari kami bayar retribusi kebersihan, tapi sampah tetap menumpuk, apalagi kalau hujan, baunya menyengat. Kadang ada petugas yang angkut, kadang tidak."

Selain kebersihan, pemerintah juga menerapkan zonasi bagi pedagang berdasarkan jenis dagangan mereka. Tujuannya adalah agar pembeli lebih mudah menemukan barang yang mereka butuhkan dan mengurangi ketidakteraturan tata ruang pasar. Namun, dalam observasi di lapangan, masih ditemukan banyak pedagang kaki lima yang berjualan di area yang seharusnya tidak digunakan untuk berdagang, seperti trotoar dan badan jalan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dibuat dan praktik di lapangan.

Dalam perspektif *governance* dalam pengelolaan pasar tradisional, regulasi yang tidak memiliki sistem pengawasan yang ketat cenderung tidak berjalan efektif. *Governance* menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, pengelola pasar, dan pedagang dalam implementasi kebijakan (Wade, 2018a). Dalam kasus Pasar Mardika, lemahnya implementasi kebijakan zonasi dan pengelolaan kebersihan menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum didukung oleh sistem monitoring yang memadai.

Disamping itu, peran pemerintah sebagai monitor terlihat dalam upaya memantau pelaksanaan kebijakan dan mengevaluasi efektivitasnya. Salah satu bentuk pengawasan adalah adanya petugas pasar yang ditugaskan untuk memeriksa kondisi kebersihan dan ketertiban pasar setiap harinya. Namun, efektivitas pengawasan ini masih menjadi perdebatan. Beberapa pedagang merasa bahwa pengawasan yang dilakukan cenderung

hanya bersifat insidental dan tidak memberikan solusi nyata bagi permasalahan yang mereka hadapi. Salah satu pedagang ikan, ARB, menuturkan bahwa “Kadang ada petugas yang datang menegur kalau ada sampah atau barang dagangan yang berantakan, tapi besoknya kembali lagi seperti biasa. Seharusnya ada solusi jangka panjang, bukan hanya teguran sesaat.”

Dalam observasi lapangan, ditemukan bahwa meskipun ada petugas yang berkeliling, mereka lebih banyak melakukan pendekatan persuasif dibandingkan dengan tindakan tegas. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme monitoring yang ada masih bersifat reaktif, bukan proaktif. Menurut teori *governance*, monitoring yang efektif dalam pengelolaan pasar tradisional harus berbasis data dan melibatkan mekanisme akuntabilitas (Painter, 2017). Artinya, evaluasi kebijakan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemerintah sebagai aktor utama.

Selain sebagai regulator dan monitor, peran pemerintah sebagai motivator menjadi aspek yang tidak kalah penting. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membangun kesadaran pedagang agar ikut serta dalam menjaga kebersihan, ketertiban, dan kelangsungan pasar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya kebersihan pasar. Namun, dalam wawancara dengan perwakilan Dinas Perdagangan & Perindustrian Kota Ambon, diakui bahwa partisipasi pedagang dalam menjaga kebersihan masih menjadi tantangan besar. AMP menambahkan bahwa ia sudah melakukan berbagai sosialisasi agar pedagang lebih sadar dalam menjaga kebersihan, namun kesadaran tersebut belum terbangun dalam diri pedagang tersebut. AMP menegaskan bahwa kesadaran bukanlah sesuatu yang mudah untuk dibangun, dan tidak bisa dibangun dalam semalam saja, tetapi butuh proses dan penyadaran yang berkelanjutan. Hal itulah yang senantiasa dilakukan oleh Dinas Perdagangan & Perindustrian Kota Ambon, terkhusus dalam pengelolaan pasar Mardika.

Dari observasi lapangan, terlihat bahwa di beberapa sudut pasar memang terdapat papan pengumuman yang mengajak pedagang untuk menjaga kebersihan. Namun, tanpa adanya mekanisme insentif yang jelas, sulit bagi pedagang untuk memiliki motivasi lebih dalam menjaga kebersihan. Dalam teori partisipasi dalam kebijakan publik, keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat (Jann & Wegrich, 2017; Reed et al., 2018). Dalam kasus ini, program motivasi pemerintah masih terbatas pada sosialisasi tanpa diikuti dengan insentif yang nyata, sehingga efektivitasnya belum optimal.

Berdasarkan temuan ini, dapat dilihat bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan Pasar Mardika masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan. Sebagai regulator, kebijakan yang ada masih menghadapi kendala dalam implementasi di lapangan. Sebagai monitor, mekanisme pengawasan yang diterapkan masih cenderung bersifat reaktif dan kurang akuntabel. Sementara itu, sebagai motivator, upaya pemerintah dalam mendorong partisipasi pedagang belum didukung oleh strategi insentif yang efektif.

Dalam konteks *governance*, pengelolaan pasar tradisional yang ideal adalah yang berbasis kolaborasi antara pemerintah, pengelola pasar, dan pedagang. Pendekatan

collaborative governance Pülzl & Treib (2017) yang menekankan pentingnya kerja sama yang lebih erat dan partisipatif antara pemerintah dan komunitas pasar. Dengan menerapkan pendekatan ini, kebijakan pengelolaan pasar tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mampu mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan pedagang sebagai aktor utama dalam aktivitas ekonomi pasar.

Dinamika Hubungan antara Pemerintah, Pengelola Pasar, dan Pedagang

Pasar Mardika bukan hanya sekadar pusat transaksi ekonomi, tetapi juga ruang sosial yang mempertemukan berbagai kepentingan. Pemerintah, pengelola pasar, dan pedagang merupakan tiga aktor utama dalam sistem pasar ini, di mana masing-masing memiliki peran, harapan, serta tantangan yang berbeda. Hubungan antara ketiga pihak ini sering kali diwarnai oleh dinamika komunikasi, koordinasi kebijakan, dan perbedaan kepentingan.

Komunikasi yang efektif antara pengelola pasar dan pedagang menjadi kunci dalam menciptakan pasar yang tertib dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat banyak celah dalam proses komunikasi ini. Seorang pedagang sayur yang telah berjualan lebih dari 10 tahun di Pasar Mardika, SAP, mengungkapkan bahwa komunikasi antara pengelola pasar dan pedagang sering kali hanya berjalan satu arah. Ia menuturkan bahwa terkadang ada pengumuman dari pengelola pasar, misalnya tentang kenaikan retribusi atau perubahan zonasi. Para pedagang tidak pernah diajak untuk berdiskusi terkait hal tersebut. SAP menegaskan bahwa tiba-tiba saja ada aturan baru, dan jika para pedagang protes, maka dikatakan bahwa ini adalah keputusan dari atas.

Dari observasi lapangan, ditemukan bahwa sosialisasi kebijakan kepada pedagang umumnya dilakukan melalui papan pengumuman atau penyampaian lisan oleh petugas pasar. Namun, tidak semua pedagang mendapat informasi yang sama, terutama mereka yang berjualan di area yang lebih padat atau tidak memiliki akses langsung ke pengelola. Akibatnya, kebijakan sering kali diimplementasikan dengan resistensi karena pedagang merasa bahwa suara mereka tidak didengar.

Dalam perspektif teori *stakeholder* oleh Jones et al. (2017), bahwa setiap aktor dalam ekosistem pasar memiliki kepentingan yang harus diperhitungkan. Pedagang adalah salah satu *stakeholder* utama yang seharusnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan tata kelola pasar. Namun, dalam kasus Pasar Mardika, komunikasi masih lebih banyak bersifat top-down, di mana keputusan dibuat oleh pemerintah atau pengelola pasar tanpa mekanisme konsultasi yang memadai. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakpuasan dan memperburuk hubungan antara pedagang dan pengelola.

Implementasi kebijakan di Pasar Mardika menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga resistensi dari pedagang. Salah satu kebijakan yang mengalami kendala adalah relokasi pedagang kaki lima yang berjualan di luar zona pasar. Meskipun pemerintah telah menetapkan area khusus untuk mereka, banyak pedagang yang tetap bertahan di lokasi lama dengan alasan strategis dan lebih ramai pembeli. Seorang petugas pengelola pasar, RPS, menjelaskan bahwa ia telah berulang kali meminta para

pedagang kaki lima untuk berpindah ke area yang telah disediakan. Namun, para pedagang kerap kembali ke lokasi lama dengan alasan bahwa tempat baru kurang ramai pembeli. Akibatnya, aturan yang telah ditetapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dari hasil observasi, terlihat bahwa banyak pedagang yang memilih tetap berjualan di tepi jalan meskipun sudah ada larangan resmi. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan perspektif antara pengelola pasar dan pedagang terkait urgensi kebijakan tersebut. Bagi pedagang, keputusan untuk tetap berjualan di tempat yang dilarang bukan semata-mata bentuk perlawanan, tetapi lebih kepada kebutuhan ekonomi dan keberlangsungan usaha mereka.

Dari sudut pandang teori kelembagaan, kegagalan dalam implementasi kebijakan sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap norma dan kebiasaan yang sudah terbentuk dalam masyarakat (Palmer et al., 2017). Dalam konteks Pasar Mardika, pedagang kaki lima telah lama terbiasa dengan pola berdagang di lokasi yang mereka anggap strategis, sehingga kebijakan relokasi tanpa strategi insentif yang jelas akan sulit berhasil. Pemerintah dan pengelola pasar perlu memahami bahwa kebijakan yang baik tidak hanya mengandalkan aturan formal, tetapi juga harus mempertimbangkan norma sosial dan ekonomi yang berlaku di komunitas pedagang.

Berdasarkan dinamika yang ada, dapat dikatakan bahwa hubungan antara pemerintah, pengelola pasar, dan pedagang di Pasar Mardika masih menghadapi tantangan besar dalam aspek komunikasi dan implementasi kebijakan. Pemerintah cenderung mengambil peran dominan dalam regulasi tanpa melibatkan pedagang secara aktif, sementara pengelola pasar masih mengalami kesulitan dalam menegakkan aturan karena resistensi dari pedagang dan keterbatasan sumber daya.

Dalam perspektif teori *stakeholder*, hubungan yang ideal dalam pengelolaan pasar tradisional adalah yang berbasis dialog dan keterlibatan semua pihak. Pedagang bukan hanya penerima kebijakan, tetapi juga harus menjadi bagian dari proses formulasi dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah membentuk forum komunikasi rutin antara pemerintah, pengelola pasar, dan perwakilan pedagang untuk membahas permasalahan dan mencari solusi bersama.

Sementara itu, dalam perspektif teori kelembagaan, keberhasilan implementasi kebijakan pasar harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya yang melekat dalam komunitas pedagang. Kebijakan yang hanya mengandalkan pendekatan formal dan hukum tanpa memahami kebiasaan dan kebutuhan pedagang akan sulit berjalan efektif. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang mekanisme insentif yang lebih menarik, seperti program pendampingan usaha bagi pedagang yang bersedia mengikuti aturan, sehingga ada keseimbangan antara kepentingan regulasi dan kesejahteraan ekonomi pedagang.

Hubungan antara pemerintah, pengelola pasar, dan pedagang di Pasar Mardika merupakan cerminan dari dinamika tata kelola pasar tradisional yang kompleks. Komunikasi yang belum sepenuhnya efektif, kendala dalam koordinasi kebijakan, serta keterbatasan sumber daya menjadi faktor utama yang memengaruhi pengelolaan pasar. Melalui

pendekatan *stakeholder* dan kelembagaan, dapat dilihat bahwa pasar tradisional yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui mekanisme tata kelola yang lebih inklusif dan berbasis partisipasi. Pemerintah dan pengelola pasar tidak dapat hanya berperan sebagai pengatur kebijakan, tetapi juga harus menjadi fasilitator yang mampu membangun dialog dan kerja sama dengan pedagang.

Permasalahan Kebersihan dan Ketertiban Pasar

Pasar Mardika sebagai pusat perekonomian yang vital bagi masyarakat Kota Ambon menghadapi tantangan serius dalam aspek kebersihan dan ketertiban. Sampah yang menumpuk, saluran air yang tersumbat, dan tata letak pedagang yang tidak tertib adalah realitas yang sering ditemui di pasar ini. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada estetika pasar tetapi juga pada kesehatan masyarakat dan kenyamanan pembeli serta pedagang. Dinamika kebersihan dan ketertiban di pasar ini mencerminkan bagaimana sistem pengelolaan yang ada belum berjalan secara efektif. Dalam analisis ini, pendekatan teori *urban governance* dan *sustainability* digunakan untuk memahami kompleksitas permasalahan serta bagaimana kebijakan yang diterapkan masih menghadapi berbagai hambatan dalam implementasinya.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan Pasar Mardika adalah sistem pengelolaan sampah yang belum berjalan optimal. Sampah organik dan anorganik sering kali bercampur tanpa ada sistem pemilahan yang jelas, sehingga memperumit proses pembuangan. Seorang petugas kebersihan pasar mengungkapkan kesulitannya dalam menangani volume sampah yang terus meningkat. Ia menjelaskan bahwa setiap hari mereka mengangkut berton-ton sampah, namun masih banyak yang dibuang sembarangan. Meskipun tempat sampah sudah penuh, para pedagang tetap menambah tumpukan sampah. Selain itu, kekurangan tenaga kerja juga menjadi tantangan dalam membersihkan seluruh area pasar.

Dari observasi lapangan, terlihat bahwa beberapa titik di Pasar Mardika menjadi area penumpukan sampah, terutama di dekat zona pedagang ikan dan sayuran. Di pagi hari, pasar tampak lebih bersih karena ada aktivitas pembersihan, namun menjelang siang hingga sore, sampah mulai menumpuk kembali. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengangkutan sampah belum cukup cepat untuk mengimbangi volume yang dihasilkan.

Dari perspektif *urban governance*, permasalahan ini bukan sekadar soal teknis pengelolaan sampah, tetapi juga menyangkut peran berbagai pemangku kepentingan dalam sistem tata kelola kota. Dalam konteks Pasar Mardika, pemerintah kota memiliki regulasi yang mengatur kebersihan pasar, tetapi implementasi regulasi ini masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pengelolaan sampah yang kurang memadai, serta rendahnya partisipasi pedagang dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, dari perspektif *sustainability*, pengelolaan sampah yang tidak efektif berisiko menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang, seperti pencemaran air dan udara. Tanpa strategi yang lebih berkelanjutan, seperti penerapan konsep *reduce, reuse, recycle* (3R) atau sistem insentif bagi pedagang yang menjaga kebersihan, masalah ini akan terus berulang dan

semakin membebani pasar serta kota secara keseluruhan.

Selain permasalahan kebersihan, ketertiban pasar juga menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi di Pasar Mardika. Salah satu aturan yang sering dilanggar adalah terkait tata letak pedagang. Beberapa pedagang yang seharusnya berjualan di dalam area pasar memilih untuk membuka lapak di jalan utama atau lorong-lorong sempit, yang akhirnya mengganggu arus lalu lintas pengunjung dan kendaraan.

Seorang pedagang pakaian yang berjualan di area yang seharusnya digunakan sebagai jalur pejalan kaki mengungkapkan alasannya. Ia menjelaskan bahwa suasana di dalam pasar cenderung sepi, sementara pembeli lebih memilih berbelanja di luar karena akses yang lebih mudah. Jika ia berpindah ke dalam, kemungkinan jumlah pembelinya akan berkurang. Oleh karena itu, ia merasa terpaksa tetap berjualan di lokasi tersebut. Dari hasil observasi, terlihat bahwa aturan tentang zonasi pedagang tidak sepenuhnya ditaati. Pedagang kaki lima masih banyak yang berjualan di luar area yang ditentukan, terutama di titik-titik yang lebih strategis secara ekonomi. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi formal yang dibuat oleh pengelola pasar dan realitas di lapangan yang dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi pedagang.

Dari perspektif *urban governance*, ketertiban pasar bergantung pada efektivitas regulasi dan mekanisme penegakan aturan. Pemerintah dan pengelola pasar bertindak sebagai regulator, tetapi jika aturan hanya bersifat normatif tanpa dukungan strategi implementasi yang adaptif, maka akan sulit bagi pedagang untuk patuh. Sementara itu, dari perspektif sustainability, pasar tradisional yang tertata rapi akan meningkatkan daya tarik bagi pembeli dan menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih sehat dan nyaman bagi semua pihak.

Permasalahan kebersihan dan ketertiban di Pasar Mardika mencerminkan kompleksitas tata kelola pasar tradisional yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui regulasi formal. Keberlanjutan lingkungan pasar yang lebih bersih dan tertib membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif, di mana berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pengelola pasar, serta pedagang dan pembeli, berkontribusi secara aktif dalam upaya perbaikan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *urban governance*, yang menekankan keterlibatan multi-aktor dalam proses pengelolaan kota secara lebih inklusif dan partisipatif (Da Cruz et al., 2019).

Salah satu aspek penting dalam perbaikan tata kelola Pasar Mardika adalah revitalisasi sistem pengelolaan sampah. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pengangkutan sampah serta menyediakan fasilitas pemilahan sampah di dalam pasar, guna mendorong perilaku yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, edukasi kepada pedagang dan pembeli mengenai pentingnya kebersihan harus diperkuat melalui kampanye yang lebih aktif dan berkelanjutan. Penerapan sistem insentif bagi pedagang yang menjaga kebersihan lapaknya juga dapat menjadi strategi efektif untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya lingkungan pasar yang sehat (Alnuaimi et al., 2021; Doh et al., 2019).

Selain kebersihan, penguatan sistem zonasi pedagang menjadi elemen krusial dalam menata kembali pasar agar lebih tertib dan efisien. Dialog yang lebih intensif dengan pedagang sebelum menerapkan kebijakan tata letak akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih realistis dan diterima oleh semua pihak. Penyediaan area yang lebih strategis bagi pedagang kaki lima juga perlu dipertimbangkan agar mereka tidak merasa dirugikan dengan aturan zonasi yang ada. Pengawasan dan pemberian sanksi bagi pelanggar aturan tetap perlu diterapkan, tetapi dengan pendekatan persuasif yang lebih humanis agar kebijakan tersebut tidak hanya bersifat represif, melainkan juga membangun kesadaran kolektif dalam menjaga keteraturan pasar (Bates, 2019).

Lebih jauh, pendekatan kolaboratif dalam *urban governance* harus diperkuat dengan membangun mekanisme komunikasi yang lebih baik antara pemerintah, pengelola pasar, dan pedagang. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan tidak bersifat top-down, melainkan berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Melibatkan komunitas pedagang dalam proses perencanaan tata kelola pasar akan memastikan kebijakan yang dibuat lebih inklusif dan mampu menjawab tantangan secara konkret. Pendekatan ini sesuai dengan konsep *participatory urban management*, yang menekankan pentingnya partisipasi warga dalam perencanaan kota guna meningkatkan efektivitas kebijakan publik (Palmer et al., 2017). Dengan mengintegrasikan berbagai strategi ini, Pasar Mardika tidak hanya dapat menjadi lebih bersih dan tertib, tetapi juga menjadi model bagi tata kelola pasar tradisional yang lebih berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan komunitas.

Pasar Inklusif: Membangun Pasar Tradisional yang Berdaya dan Tertata:

Pasar Mardika bukan sekadar pusat jual beli, tetapi juga jantung ekonomi bagi banyak pedagang kecil di Kota Ambon. Bagi sebagian besar pedagang, pasar ini adalah sumber penghidupan utama yang menopang keluarga dan komunitas mereka. Namun, di tengah arus modernisasi dan tantangan pengelolaan, muncul pertanyaan penting tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan pedagang tanpa menghilangkan karakter tradisional pasar. Tantangan ini perlu diselesaikan dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Konsep inklusivitas dalam kebijakan publik menekankan pentingnya keterlibatan pedagang dalam pengambilan keputusan, sementara teori keberlanjutan ekonomi lokal menyoroti bagaimana pasar tradisional bisa bertahan dan berkembang tanpa mengorbankan ekosistem usaha kecil.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan Pasar Mardika adalah keterbatasan ruang bagi pedagang untuk ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan. Selama ini, banyak keputusan mengenai pasar—seperti penataan ulang zonasi, kebijakan retribusi, hingga aturan kebersihan—dibuat secara top-down oleh pemerintah dan pengelola pasar. Dari hasil observasi, terlihat bahwa kurangnya komunikasi dua arah menjadi pemicu utama ketidakpuasan pedagang terhadap kebijakan pasar. Beberapa pedagang merasa bahwa aturan yang dibuat sering kali tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga sulit untuk diterapkan.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di Pasar Mardika, penerapan mekanisme partisipatif menjadi sangat penting. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan keterlibatan

aktif para pedagang dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan mampu mencerminkan aspirasi dan kebutuhan nyata mereka. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah pembentukan forum pedagang yang berfungsi sebagai wadah komunikasi antara pedagang, pengelola pasar, dan pemerintah. Dalam forum ini, para pedagang dapat menyampaikan aspirasi dan saran sebelum kebijakan baru diberlakukan, serta berperan sebagai pengawas yang memastikan aturan yang ditetapkan tetap berpihak pada kesejahteraan pedagang kecil (Jann & Wegrich, 2017; Jones et al., 2017).

Selain itu, musyawarah rutin dengan perwakilan pedagang sebelum penerapan kebijakan baru juga sangat krusial. Pendekatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap kebijakan yang ada, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan dan dukungan implementasinya. Tidak kalah penting, peningkatan literasi kebijakan untuk para pedagang harus dilakukan secara berkala melalui sosialisasi dan pelatihan, mengingat banyak pedagang yang belum sepenuhnya memahami aturan atau hak-hak mereka sebagai pelaku usaha di pasar. Dengan strategi-strategi tersebut, diharapkan tercipta sistem pengelolaan pasar yang lebih responsif, adil, dan inklusif, sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola publik modern (Da Cruz et al., 2019).

Modernisasi pasar tradisional sering kali menghadapi dilema antara peningkatan fasilitas dan pelestarian keunikan pasar itu sendiri. Di beberapa daerah, program revitalisasi justru menyebabkan penurunan jumlah pembeli karena karakter asli pasar berubah drastis dan menjadi terlalu steril, sehingga kehilangan daya tariknya sebagai ruang interaksi ekonomi dan sosial masyarakat. Seorang pedagang ikan yang telah berjualan di Pasar Mardika selama 15 tahun, NA, menyoroti pentingnya mempertahankan ciri khas pasar. Ia mengatakan bahwa "jika pasar ini dibuat seperti mal, orang mungkin tidak akan datang lagi. Mereka suka belanja di sini karena harganya terjangkau dan bisa tawar-menawar."

Observasi di Pasar Mardika menunjukkan bahwa interaksi sosial antara penjual dan pembeli menjadi salah satu daya tarik utama yang membuat pasar ini tetap hidup. Atmosfer yang dinamis, suara tawar-menawar, serta kebersamaan antar pedagang adalah elemen esensial yang membedakan pasar tradisional dari pusat perbelanjaan modern. Oleh karena itu, modernisasi harus dilakukan dengan mempertahankan aspek sosial dan budaya pasar agar tetap relevan bagi masyarakat setempat (Palmer et al., 2017).

Salah satu strategi utama adalah peningkatan infrastruktur tanpa mengubah karakter pasar. Modernisasi sebaiknya difokuskan pada penyediaan fasilitas sanitasi yang lebih baik, peningkatan sistem drainase, serta pencahayaan yang lebih optimal, tanpa melakukan perubahan drastis pada tata letak pasar yang dapat mengurangi interaksi sosial antar pedagang dan pembeli. Selain itu, digitalisasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing tanpa menghilangkan pengalaman belanja fisik. Pemerintah dapat mendorong pedagang memanfaatkan platform digital untuk pemasaran, seperti penerapan e-retribusi atau promosi produk melalui media sosial, yang tetap mempertahankan interaksi langsung antara pedagang dan pelanggan (Wade, 2018a).

Aspek penting lainnya adalah penyediaan ruang bagi pedagang kecil agar tidak tersingkir oleh pemodal besar. Dalam beberapa kasus, modernisasi pasar membuka peluang bagi pedagang besar atau waralaba untuk masuk, sehingga menggeser keberadaan pedagang kecil. Oleh karena itu, kebijakan revitalisasi harus tetap memberikan ruang utama bagi mereka agar tetap dapat bertahan. Dalam perspektif teori keberlanjutan ekonomi lokal, strategi ini bertujuan agar pasar tetap relevan di era modern tanpa mengorbankan identitasnya sebagai pasar rakyat. Dengan pendekatan ini, modernisasi tidak menjadi ancaman bagi pedagang kecil, tetapi justru menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui sistem tata kelola yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Wade, 2018b).

Kesejahteraan pedagang dan keberlanjutan Pasar Mardika dapat dicapai dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan inklusif. Keterlibatan pedagang dalam pengelolaan pasar akan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat lebih efektif dan berpihak pada mereka. Sementara itu, modernisasi pasar harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menghilangkan karakter tradisional yang menjadi daya tarik utama pasar ini. Dalam konteks inklusi kebijakan publik, partisipasi pedagang dalam pengambilan keputusan akan menciptakan kebijakan yang lebih adil dan aplikatif. Sementara dari perspektif keberlanjutan ekonomi lokal, keseimbangan antara modernisasi dan tradisi akan memastikan bahwa pasar tetap menjadi pusat ekonomi yang berkembang tanpa mengorbankan pedagang kecil.

SIMPULAN

Pasar tradisional, sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat, memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah. Dalam konteks Pasar Mardika Kota Ambon, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penataan dan pengelolaannya guna menciptakan pasar yang berdaya dan tertata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan pasar sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah sebagai regulator, monitor, dan motivator dengan pedagang sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi. Kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Ambon dalam menata Pasar Mardika menunjukkan adanya upaya serius dalam mengatur zonasi, menjaga ketertiban, serta meningkatkan kesejahteraan pedagang. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pengelolaan sampah dan transparansi tata kelola. Kendala ini diperparah oleh kurangnya komunikasi yang terbuka antara pengelola pasar dan pedagang, sehingga implementasi kebijakan sering kali tidak berjalan optimal di lapangan.

Dalam perspektif kebijakan publik dan tata kelola pasar tradisional, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan partisipatif merupakan kunci utama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pasar. Keterlibatan pedagang dalam pengambilan keputusan dan mekanisme komunikasi yang lebih inklusif akan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap kebijakan yang diterapkan. Selain itu, modernisasi pasar harus dilakukan tanpa menghilangkan karakter tradisionalnya, agar tetap menjadi ruang ekonomi yang inklusif bagi

masyarakat setempat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa membangun pasar yang berdaya dan tertata memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada regulasi, tetapi juga pada penguatan kemitraan antara pemerintah dan pedagang. Sinergi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan pedagang, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi lokal secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih adaptif, transparan, dan berbasis partisipasi menjadi landasan utama dalam mewujudkan pasar tradisional yang lebih tertata, produktif, dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Alnuaimi, M., Alzoubi, H. M., Ajelat, D., & Alzoubi, A. A. (2021). Towards intelligent organisations: An empirical investigation of learning orientation's role in technical innovation. *International Journal of Innovation and Learning*, 29(2), 207–221.
- Bacq, S., Hertel, C., & Lumpkin, G. T. (2022). Communities at the nexus of entrepreneurship and societal impact: A cross-disciplinary literature review. *Journal of Business Venturing*, 37(5), 106231.
- Bates, R. H. (2019). Modernization, ethnic competition, and the rationality of politics in contemporary Africa. In *State versus ethnic claims* (pp. 152–171). Routledge.
- Bogers, M., Chesbrough, H., & Strand, R. (2020). Sustainable open innovation to address a grand challenge: Lessons from Carlsberg and the Green Fiber Bottle. *British Food Journal*, 122(5), 1505–1517.
- Braun, V., & Clarke, V. (2016). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Civera, C., De Colle, S., & Casalegno, C. (2019). Stakeholder engagement through empowerment: The case of coffee farmers. *Business Ethics: A European Review*, 28(2), 156–174.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications.
- Cull, R., Xu, L. C., Yang, X., Zhou, L.-A., & Zhu, T. (2017). Market facilitation by local government and firm efficiency: Evidence from China. *Journal of Corporate Finance*, 42, 460–480.
- Da Cruz, N. F., Rode, P., & McQuarrie, M. (2019). New urban governance: A review of current themes and future priorities. *Journal of Urban Affairs*, 41(1), 1–19.
- Dangelico, R. M., & Vocalelli, D. (2017). “Green Marketing”: An analysis of definitions, strategy steps, and tools through a systematic review of the literature. *Journal of Cleaner Production*, 165, 1263–1279.
- Dewasiri, N., Banda, Y. K. W., & Azeez, A. A. (2018). Triangulation approaches in finance research. *Colombo Journal of Multi-Disciplinary Research*, 3(2).
- Doh, J. P., Tashman, P., & Benischke, M. H. (2019). Adapting to grand environmental challenges through collective entrepreneurship. *Academy of Management Perspectives*, 33(4), 450–468.
- Jafari, A., Aly, M., & Doherty, A. M. (2022). An analytical review of market system dynamics in consumer culture theory research: Insights from the sociology of markets. *Journal of Business Research*, 139, 1261–1274.
- Jan, A. A., Lai, F.-W., & Tahir, M. (2021). Developing an Islamic Corporate Governance framework to examine sustainability performance in Islamic Banks and Financial

- Institutions. *Journal of Cleaner Production*, 315, 128099.
- Jann, W., & Wegrich, K. (2017). Theories of the policy cycle. In *Handbook of public policy analysis* (pp. 69–88). Routledge.
- Jones, T. M., Wicks, A. C., & Freeman, R. E. (2017). Stakeholder theory: The state of the art. *The Blackwell Guide to Business Ethics*, 17–37.
- Kobloy, L. M. (2021). *Perempuan dan Dialog Kehidupan: Studi Terhadap Peran Perempuan-Perempuan Pedagang Kristen dan Islam Di Pasar Mardika dalam Membangun Relasi Antar Agama Pasca Konflik*. Universitas Kristen Duta Wacana.
- Koopmans, M. E., Rogge, E., Mettepenningen, E., Knickel, K., & Šūmane, S. (2018). The role of multi-actor governance in aligning farm modernization and sustainable rural development. *Journal of Rural Studies*, 59, 252–262.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2019). *Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing*. sage.
- Liu, W., & Atuahene-Gima, K. (2018). Enhancing product innovation performance in a dysfunctional competitive environment: The roles of competitive strategies and market-based assets. *Industrial Marketing Management*, 73, 7–20.
- Luturlen, M. (2018). *Analisis kandungan bakteri Vibrio spp pada ikan asap yang dijajakan di pasar Mardika Ambon sebagai modul praktikum mikrobiologi lanjut*. IAIN AMBON.
- Moon, M. D. (2019). Triangulation: A method to increase validity, reliability, and legitimation in clinical research. *Journal of Emergency Nursing*, 45(1), 103–105.
- Nendissa, A. R. (2022). Studi Tingkat Kepadatan Lalat di Pasar Mardika Kota Ambon. *Moluccas Health Journal*, 4(2), 7–13.
- Painter, J. (2017). State and governance. *A Companion to Economic Geography*, 359–376.
- Palmer, D., Greenwood, R., Oliver, C., Lawrence, T. B., & Meyer, R. E. (2017). Institutions, institutional theory and organizational wrongdoing. *The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism*, 737–758.
- Pattiasina, M., & Tantoly, M. (2019). Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Buah–Buahan Di Pasar Mardika Kota Ambon. *Agrilan: Jurnal Agribisnis Kepulauan*, 7(3), 298–313.
- Perren, R., & Kozinets, R. V. (2018). Lateral exchange markets: How social platforms operate in a networked economy. *Journal of Marketing*, 82(1), 20–36.
- Pülzl, H., & Treib, O. (2017). Implementing public policy. In *Handbook of public policy analysis* (pp. 115–134). Routledge.
- Reed, M. S., Vella, S., Challies, E., De Vente, J., Frewer, L., Hohenwallner-Ries, D., Huber, T., Neumann, R. K., Oughton, E. A., & Sidoli del Ceno, J. (2018). A theory of participation: what makes stakeholder and public engagement in environmental management work? *Restoration Ecology*, 26, S7–S17.
- Soselisa, H. W. (2022). Peran Penjual Ikan Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Di Pasar Mardika Ambon). *Jurnal Badati*, 4(2), 76–92.
- Sousa, T., Soares, T., Pinson, P., Moret, F., Baroche, T., & Sorin, E. (2019). Peer-to-peer and community-based markets: A comprehensive review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 104, 367–378.
- Suprayitno, B., Nurseto, T., & Fikri, A. A. H. S. (2019). The Profile of Crime and Security Conditions in Province DI Yogyakarta (DIY) and Willingness to Pay (WTP) of the People for Reducing Crime. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 10(5 (43)), 1570–1597.

- Wade, R. (2018a). *Governing the market: Economic theory and the role of government in East Asian industrialization*.
- Wade, R. (2018b). *Governing the Market* (5th ed.). Princeton University Press.
<https://doi.org/10.2307/j.ctv346sp7>